

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH
(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)**

**Andys Dwi Saputra
Nengah Sudjana
Mochammad Djudi**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
105030400111019@mail.ub.ac.id)

Abstract

Local tax is contributing the highest revenue to Local Genuine Income (PAD). The government attempts to increase the effectiveness of local tax collection to improve PAD, especially through tax post. There are factors influencing the effectiveness of local tax revenue. The objective of research is to understand the influence of inflation rate, population rate, and Gross Regional Domestic Product (PDRB) on local tax revenue in Tulungagung District in period 2008-2012. Data type is secondary data (time series) for period 2008-2012 obtained from the Official of Local Revenue and the Statistic Bureau (BPS) in Tulungagung District. Literature study is conducted to support data collection. Result of research indicates that the effectiveness of local tax collection in Tulungagung District in period 2008-2012 is entirely very effective. Of all three variables observed, which are inflation rate, population rate and PDRB, one with the most dominant influence on local tax revenue is population rate. Based these results, it may be suggested that the local government of Tulungagung District, especially the Official of Local Revenue of Tulungagung District, in determining local tax shall firstly socialize the importance of tax for the development such that taxpayer will be aware of paying tax in exchange for their welfare.

Keywords: Local Tax, Inflation Rate, Population Rate and PDRB

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki kondisi tingkat perekonomian yang berbeda pada setiap daerahnya, menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar setiap daerah mampu untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan daerah itu sendiri, seperti masalah kebijakan, keuangan, perekonomian dll. Sehingga pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan keuangan asli daerah yang penting bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan program otonomi daerahnya, tinggi rendahnya PAD pada suatu daerah akan berpengaruh pada kelancaran otonomi daerah tersebut, selain itu dengan PAD otonomi daerah juga akan bisa berjalan dengan optimal.

PAD merupakan suatu cerminan dari keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan dan potensi – potensi yang ada pada suatu daerah tersebut untuk dijadikan suatu pendapatan bagi daerahnya. PAD sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari : Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah yang sah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2012

	Target	Realisasi
Pajak Daerah	Rp.22310.000.000	Rp.25544.000.000
Retribusi Daerah	Rp.14335.000.000	Rp.15585.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.1.855.000.000	Rp.1.855.000.000
PAD Lain-lain	Rp.92267.000.000	Rp.119.177.000.000
Jumlah PAD	Rp.130768.000.000	Rp.162.162.000.000

Sumber : <http://www.dispenda.pemkabta.com> (2013).

Berdasarkan table 1 di atas, meskipun lebih rendah dari PAD lain-lain, dapat dilihat bahwa sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung dengan realisasi sebesar Rp 25.544.000.000 . Pungutan Pajak Daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan laju inflasi, jumlah penduduk dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah. Laju inflasi merupakan salah satu

faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak daerah, hal ini disebabkan karena tingginya tingkat laju inflasi akan berimbas pada naiknya harga barang-barang yang ada dipasaran, akan berpengaruh pada menurunnya nilai mata uang pada daerah tersebut, selain itu juga akan berdampak pada keadaan perekonomian masyarakat pada suatu daerah, dan nantinya akan berdampak pula pada menurunnya kesadaran wajib pajak untuk membayar tanggungan pajaknya, terutama pajak daerah.

Perkembangan jumlah penduduk juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena dengan banyaknya jumlah penduduk pada suatu daerah, maka potensi bertambahnya wajib pajak pada suatu daerah juga akan semakin besar, dengan bertambahnya potensi wajib pajak, potensi penerimaan pajak daerah juga akan bertambah, karena akan semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan obyek-obyek pajak daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB merupakan cerminan tinggi rendahnya pendapatan pada suatu daerah, semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan ekonomi masyarakatnya, sehingga tingginya nilai PDRB pada suatu daerah akan berpotensi untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian diatas sangat menarik untuk dikaji seberapa efektif pos pajak daerah tersebut, dan bagaimana pengaruh laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB dalam mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak pada suatu daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah " hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Mardiasmo (2003:59), menjelaskan misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, adalah "Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, Memberdayakan dan menciptakan

ruang bagi masyarakat (*publik*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan".

Sumber- Sumber Pendapatan Daerah

Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil, Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan-penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pemungutan Pajak & Pajak Daerah

Menurut Soemitro dalam Suandy (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sistem Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2011:7-8)

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

Mekanisme pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan empat asas Smith dalam Prawoto (2010:56), yaitu asas *equality*, asas *certainty*, asas *convenience of payment* dan asas *efficiency*.

Dalam Perda No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah di Kabupaten Tulungagung, Jenis Pajak dan tarif pajak Kabupaten Tulungagung yaitu :

1. Pajak Hotel, tarif sebesar 10%
2. Pajak Restoran, tarif sebesar 10%
3. Pajak Hiburan, tarif sebesar 35%
4. Pajak Reklame, tarif sebesar 25%

5. Pajak Penerangan Jalan, tarif sebesar 10%
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tarif sebesar 25%
7. Pajak Parkir, tarif sebesar 30%
8. Pajak Air Tanah, tarif sebesar 20%
9. Pajak Sarang Burung Walet, tarif sebesar 10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tariff sebesar 0,3%
11. BPHTB, tarif sebesar 5%

Jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan penambahan 3 (tiga) jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru, yaitu PBB Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak baru yang dapat dipungut oleh beberapa daerah apabila memiliki potensi pajak yang memadai. Pemberlakuan pemungutan pajak baru tersebut dilakukan secara bertahap.

Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan besarnya target penerimaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nilai efektivitas digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja pemungut pajak daerah dalam melaksanakan proses pemungutan pajak daerah, serta bisa digunakan untuk dijadikan dasar dalam menentukan berapa target penerimaan pajak daerah pada tahun berikutnya.

Pengaruh Laju Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB terhadap efektivitas pemungutan Pajak Daerah

1. Laju Inflasi

Laju Inflasi adalah peristiwa kecenderungan naiknya harga-harga suatu barang secara umum, terjadi terus-menerus dan meluas atau berimbas pada meningkatnya pada harga barang-barang lainnya. Beberapa indeks harga yang sering digunakan dalam pengukuran inflasi adalah :

- a. Indeks harga konsumen/IHK (*consumer price index*)
- b. Indeks harga perdagangan (*whole sale price index*), dan
- c. GNP deflator

2. Jumlah Penduduk

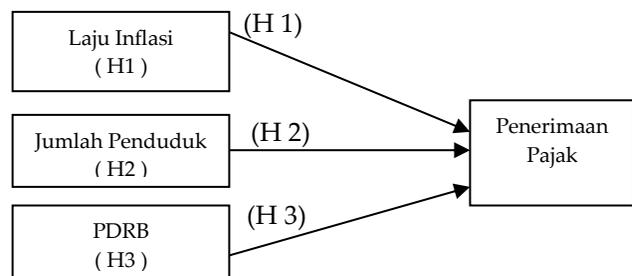
Berdasarkan (Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, 1996) “Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang

dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap dihitung per tiga orang”. Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki beberapa sumber data kependudukan, yaitu hasil sensus, survei, dan registrasi penduduk.

3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Sukirno (2004) PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Untuk mencari nilai PDRB, yaitu dapat dihitung dengan cara membagi antara pendapatan regional atas harga berlaku dan atas harga konstan, dan setelah itu dikalikan dengan 100 %.

Hipotesis Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka hipotesis diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel Laju Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.
2. Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.
3. Diduga variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan variabel laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB sebagai variabel independen dan penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode *Explanatory research*

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Tulungagung. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena peneliti tertarik dengan tingkat penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung yang presentase kenaikannya tiap tahun sangat tinggi, bahkan selalu melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara Dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dan data runtun waktu (*time series*) dengan periode pengamatan per triwulan antara tahun 2008 sampai tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis Rasio, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Analisis Rasio

Tingkat efektivitas diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala pengukuran tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak

Nilai	Keterangan
95 % - 100 %	Sangat Efektif (SE)
80 % - < 94 %	Efektif (E)
68 % - < 79 %	Cukup Efektif (CE)
56 % - < 67 %	Kurang Efektif (KE)
0 % - < 55 %	Tidak Efektif (TE)

Sumber : Mahmudi, (2007).

2. Uji asumsi klasik

- Uji Normalitas
- Uji Asumsi Multikolinieritas
- Uji Asumsi Heterokedastisitas
- Uji Asumsi Autokorelasi

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linear Berganda, dengan rumus sebagai berikut : Menurut Gujarati (1995:196), $Y = \beta_0 + \beta_1 \text{INF} + \beta_2 \text{JMLPDK} + \beta_3 \text{PDRB} + \mu_i$ Uji hipotesis pada penelitian ini terdiri dari :

- Koefisien Determinasi (R^2)
- Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
- Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

PEMBAHASAN

Data laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB Kabupaten Tulungagung tahun 2008-2012 per triwulan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Perkembangan Laju Inflasi dan Jumlah Penduduk (jiwa) dan PDRB Kab. Tulungagung tahun 2008 - 2012.

Tahun	Laju Inflasi	Jumlah Penduduk	PDRB
2008	9,25 %	1.025.034	Rp. 1.679.228,91
	9,25 %	1.025.034	Rp. 1.713.880,87
	9,25 %	1.025.034	Rp. 1.748.532,83
	9,25 %	1.025.034	Rp. 1.783.184,79
2009	4,64 %	1.030.926	Rp. 1.798.187,39
	4,64 %	1.030.926	Rp. 1.824.979,61
	4,64 %	1.030.926	Rp. 1.851.771,83
2010	6,25 %	1.037.369	Rp. 1.912.811,14
	6,25 %	1.037.369	Rp. 1.942.585,30
	6,25 %	1.037.369	Rp. 1.972.359,47
2011	3,60 %	1.043.386	Rp. 2.039.851,31
	3,60 %	1.043.386	Rp. 2.072.802,89
	3,60 %	1.043.386	Rp. 2.105.754,46
2012	4,63 %	1.048.472	Rp. 2.180.543,48
	4,63 %	1.048.472	Rp. 2.217.049,41
	4,63 %	1.048.472	Rp. 2.253.555,33
			Rp. 2.290.061,25

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung, (2014).

Tabel 4. Efektivitas Pemungutan jenis Pajak Daerah di Kab. Tulungagung Tahun 2008-2012

Jenis Pajak	Total target 2008-2012	Total realisasi 2008-2012	Eektivitas (%)
Pajak Restoran	Rp.5754000000	Rp.7795941966	135%(SE)
BPHIB	Rp.7295510499	Rp.9262813293	126%(SE)
Pajak Air Tanah	Rp.270000000	Rp.322290000	119%(SE)
Pajak Hotel	Rp.3325000000	Rp.3950608232	119%(SE)
Pajak Hiburan	Rp.1010000000	Rp.1210015448	119%(SE)
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rp.555000000	Rp.668110832	120%(SE)
Pajak Reklame	Rp.3160000000	Rp.3477668740	110%(SE)
Pajak Parkir	Rp.1225000000	Rp.1425349499	116%(SE)
Pajak Penerangan Jalan	Rp.57829000000	Rp.61744438550	106%(SE)

Sumber : DISPENDA Kabupaten Tulungagung, (2014).

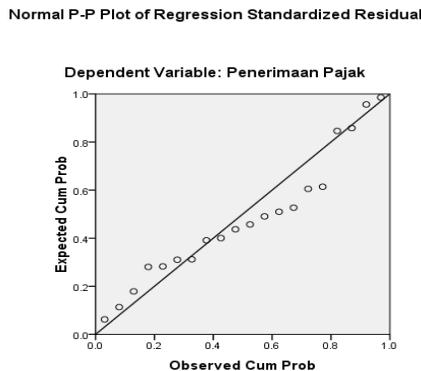
Data per triwulan jumlah penduduk dan laju inflasi yang disajikan pada penelitian ini, besarnya sama dengan data per tahun, yang disebabkan karena adanya keterbatasan data kemudian diasumsikan bahwa besarnya data pada satu tahun adalah sama nilainya dengan nilai per triwulan, dan nilai satu tahun itu bukan merupakan penjumlahan tiap triwulan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung telah mampu mencapai target penerimaan Pajak Daerah. Kondisi ini terlihat dari tingkat efektivitas yang selalu mencapai diatas 100 %. Pada uji asumsi klasik dan uji hipotesis data laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB di logaritma natural (Ln).

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Asumsi Normalitas

Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan gambar histogram dan normal p-p plot serta uji Kolmogorov-Smirnov.



Gambar 2. Histogram dan Normal P-P Plot Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Residual (Galat)	Signifikansi K-S	Keterangan
Model	0,564	Normal

Sumber : Data Diolah, (2014).

Dari gambar 2 memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal serta Nilai Kolmogorov-Smirnov 0,564 lebih besar dari alpha 5% (0,050) maka dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Asumsi Multikolinieritas

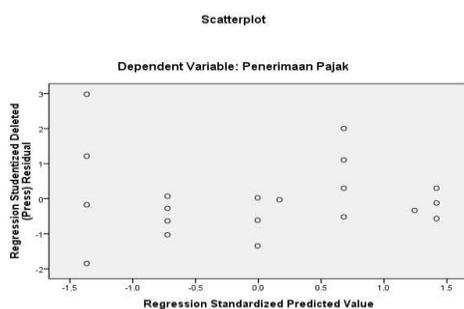
Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
Laju Inflasi (X1)	.432	2.317	Bebas multikol
Jumlah Penduduk (X2)	.107	9.344	Bebas Multikol
PDRB (X3)	.101	9.934	Bebas Multikol

Sumber : Data Diolah, (2014).

Tabel 6 merupakan hasil pengujian menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF pada Laju Inflasi (X1), Jumlah Penduduk (X2) dan PDRB (X3) lebih kecil dari 10, maka hipotesis H_0 ditolak, sehingga secara umum asumsi ini terpenuhi.

3. Uji Asumsi Heterokedastisitas



Gambar 3. Scatterplot Uji Heterokedastisitas

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode grafik. Hasil analisis pada Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas, sehingga asumsi ini terpenuhi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

4. Asumsi Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Pengujian Autokorelasi

A	dL	C	dU	B	4dU	C	4dL	A
	0,998		1,676		2,324		3,002	

Durbin Watson (DW)=1,441

Sumber : Data Diolah, (2014).

Keterangan: A: Terdapat autokorelasi B: Bebas autokorelasi C: Daerah abu-abu Pada Tabel 7 didapatkan nilai DW sebesar 1,441 yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan berada pada daerah abu-abu karena berada antara nilai dL dan nilai dU.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS versi 16.0 .

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel bebas	Koefisien Regresi	t hitung	Sig. t	Keterangan
(Constant)	-433.353	-4.702	.000	
Laju Inflasi (X1)	.058	.670	.512	Non Signifikan
Jumlah Penduduk (X2)	33.035	4.476	.000	Signifikan
PDRB (X3)	.541	.851	.407	Non Signifikan

t tabel = $t_{(337)}$ = 2,120
R = 0,968
R-square = 0,938
Adj. R-square = 0,926
F hitung = 80,089
Sig. F = 0,000
F tabel $(3,337)$ = 3,239

Sumber : Data Diolah, (2014).

Koefisien regresi Laju Inflasi (X1) sebesar 0,058 dengan nilai t hitung 0,670 (lebih kecil dari 2,120) atau nilai signifikan 0,512 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel Inflasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan Inflasi (X1) sebesar 1 % maka Penerimaan Pajak (Y) belum tentu akan mengalami peningkatan sebesar 0,670 juta.

Koefisien regresi Jumlah Penduduk (X2) sebesar 33,035 dengan nilai t hitung 4,476 (lebih besar dari 2,120) atau nilai signifikan 0,00 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa variabel Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa

apabila peningkatan Inflasi (X1) sebesar 1 juta orang maka Penerimaan Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4,476 juta.

Koefisien regresi PDRB (X3) sebesar 0,541 dengan nilai t hitung 0,851 (lebih kecil dari 2,120) atau nilai signifikan 0,407 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel PDRB (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan PDRB (X3) sebesar 1 juta maka Penerimaan Pajak (Y) belum tentu mengalami peningkatan sebesar 0,851 juta.

2. Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan Tabel 8. dapat diketahui nilai *R Square* sebesar 93,8 atau 94,0%. Artinya variabel Penerimaan Pajak (Y) dijelaskan sebesar 93,8% oleh variabel Laju Inflasi (X1), Jumlah Penduduk (X2), PDRB (X3). Sedangkan sisanya sebesar 6,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi.

3. Uji Hipotesis Simultan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa F hitung > Ftabel (80,089 > 3,239) dan Sig F < 5% (0,000 < 0,05). Dengan demikian H₁ diterima dan H₀ ditolak yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

4. Hasil Uji Parsial

Table 9. Perhitungan Uji Hipotesis Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-443.353	94.298		-4.702	.000
Laju Inflasi	.058	.086	.064	.670	.512
Jumlah Penduduk	33.035	7.380	.855	4.476	.000
PDRB	.541	.636	.168	.851	.407

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Data Diolah, (2014).

- Variabel laju Inflasi (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 0,670. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,120) dan Sig t (0,512) lebih besar dari 5% (0,05). Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel laju Inflasi (X1) tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y).
- Variabel Jumlah Penduduk (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 4,476. Nilai ini lebih besar dari t tabel (2,120) dan Sig t (0,000) lebih besar dari 5% (0,05). Hal ini

menjelaskan bahwa secara parsial variabel Jumlah Penduduk (X2) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y).

- Variabel PDRB (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 0,541. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,120) dan Sig t (0,407) lebih besar dari 5% (0,05). Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel PDRB (X3) tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y)

Interprestasi Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel laju inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Alfian (2010). Hal ini disebabkan karena laju inflasi tidak berpengaruh terhadap orang yang mempunyai penghasilan tinggi, inflasi hanya berpengaruh terhadap orang yang mempunyai penghasilan rendah. laju inflasi tidak terlalu berpengaruh, karena kemampuan ekonomi dan sifat konsumtif dari orang yang berpengasilan tinggi tersebut masih tinggi. Masyarakat berkemampuan tinggi masih mampu menggunakan fasilitas-fasilitas/obyek pajak daerah, yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, contohnya pergi ke hotel, restoran, hiburan, bayar parkir dan obyek pajak daerah lainnya. Sehingga pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah masih relatif stabil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kristiana (2010). Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena disebabkan oleh bertambahnya potensi jumlah penduduk untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dikenai pajak daerah. Jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka potensi jumlah wajib pajak juga akan semakin besar, Sehingga variabel jumlah penduduk berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kristiana (2010). Tinggi rendahnya nilai PDRB menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Tulungagung. Nilai PDRB dari Kabupaten Tulungagung cukup tinggi, ini menggambarkan bahwa kemampuan ekonomi serta kemakmuran masyarakat cukup tinggi pula. Akan tetapi apabila kemampuan

masyarakat yang tinggi, tetapi tidak diikuti dengan banyaknya masyarakat untuk memakai fasilitas-fasilitas yang dikenai pajak daerah, maka PDRB tidak akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Bersadarkan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008 – 2012 secara keseluruhan sangat efektif.
2. Hasil Uji parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X2) mempengaruhi variabel penerimaan pajak (Y), sedangkan variabel Laju Inflasi (X1) dan PDRB (X3) tidak mempengaruhi variabel penerimaan pajak daerah (Y).
3. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R²) sebesar 93,8. Berarti bahwa 93,8 % variasi variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel Laju Inflasi, Jumlah Penduduk dan PDRB. Sedangkan sisanya yaitu 6,2 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar faktor yang ada dalam penelitian ini.
4. Hasil Uji simultan (uji F) menunjukkan variabel Laju inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
5. Hasil pengujian asumsi klasik menyimpulkan bahwa variabel Laju Inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB pada uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi, sedangkan pada uji autokorelasi terdapat pada daerah abu-abu
6. Variabel Jumlah Penduduk merupakan variabel yang mempengaruhi besarnya penerimaan Pajak Daerah, variabel ini bisa digunakan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan tentang Efektivitas pemungutan Pajak Daerah.

Saran

Bersadarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Nilai efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan adalah yang paling kecil yaitu sebesar 106 %, maka diharapkan pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar beban pajak yang ditanggungnya

atas pajak penerangan jalan, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak penerangan jalan dan peraturan pajak yang mengikatnya. Dengan pahamnya masyarakat tentang pajak penerangan jalan, maka akan membawa dampak positif dalam pembayaran pajak, serta akan meningkatkan nilai efektivitas pemungutan pajaknya.

2. Jumlah Penduduk sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pajak Daerah, seharusnya dioptimalkan yaitu dengan cara meningkatkan jumlah lapangan kerja, serta meningkatkan Sumberdaya manusia (SDM) dari penduduk tersebut, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan serta SDM yang tinggi, maka akan menyebabkan semakin besar pula potensi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat membuat penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam serta menggunakan olah data dengan metode analisa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Damodar, Gujarati. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- DPPKAD Kabupaten Tulungagung. <http://www.dispenda.pemkabta.com>. Selasa 10 Desember 2013 15.38
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kristiana Advina Helti, (2010) "*Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pajak daerah serta tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan*". Skripsi. UNS Surakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STI YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :Andi.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Nurrohman, Alfian. 2010. "*Analisis faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota Surakarta (Tahun 1994-2007)*". Skripsi . UNS Surakarta.
- Prawoto, Agus. 2010. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Perencanaan Tenaga Kerja Nasional Tahun 1996, Departemen Tenaga Kerja RI. Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang, Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan teori dan kasus.* Jakarta. Salemba empat.
- Sadono S. (2004). *Pengantar Teori Mikroekonomi.* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak.* Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta